

Politik dan Pendidikan Moral di Jepang

Politics and Moral education in Japan

by Yasumasa

in

Cummings, William K., Gopithan S., dan Tomoda, Yasumasa (1988). *The Revival of Values Education II Asia And The West*, England: Pergamon Press.

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur, saya panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, karena hingga kini penulis masih mendapat kesempatan menimba ilmu dan mendapat bimbingan penuh dari dosen pembimbing mata kuliah “Perkembangan Pendidikan di Era Global”. Berbagai pengetahuan yang penulis terima pada setiap tatap muka di kelas dan diskusi membuat penulis kritis terhadap persoalan dunia pendidikan. Semoga pembelajaran ini, mendapat rahmat dan ibadah bagi pembimbing secara khusus dan bagi kami sebagai warga belajar.

Buku **The Revival of Values Education in Asia and The West**, menurut penulis adalah perspektif lain dalam pembahasan pendidikan di berbagai negara di dunia yang memberikan gambaran yang luas dan memberikan masukan perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Sisi yang paling berharga dari potensi manusia yang dapat mengendalikan, mengarahkan segala sesuatu tindakan manusia (termasuk pendidikan) menjadi lebih “manusiawi” tidak lain adalah

“values in education” yang merupakan ruh dalam pendidikan dan dimana pendidikan menjadi lebih “bernilai “ bagi dirinya juga orang lain

“*share values for better world*” (pencanangan program pendidikan dunia terkini versi PBB)

Bahkan dalam buku Cooper dan Sawaf (executive EQ) menyampaikan sesuatu yang memiliki makna yang luar biasa yang terakumulasi dalam Emosional Intelegensi yang didalamnya termasuk “nilai-nilai pendidikan” atau *goodness* yang meliputi logika, etika dan estetika,

“Emotional Intelligence is the ability sense, understand, and effectively apply the power and acumen of emotions as a source of human energy, information, connection, and influence” (xiii, Copper & Sawaf)

Emosional intelegence merupakan kemampuan perasaan, memahami, dan efektifitas dalam memanfaatkan potensi dirinya, kepekaan /kecerdasan emosi sebagai suatu sumber energi manusia, —mengolah informasi, —berhubungan dengan orang lain, dan —mempengaruhi orang lain secara positif.

Berbagai hal berkaitan **kebangkitan pendidikan nilai** dalam buku ini secara analitis dijelaskan dalam buku ini lengkap dengan berbagai contoh berdasarkan kesejarahan, dan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di suatu negara secara lengkap dan ilmiah. Penulis, dalam kajian buku (Book Report), akan menjelaskan berbagai hal yang dianggap penting saja, penting akan penulis kutip dan dikaji, dilengkapi dengan penjelasan yang menguatkannya. Sebagai pembanding buku-buku pendamping akan menjadi bagian dalam pembahasan Book Report ini.

Harapan penulis, kajian buku ini secara khusus bermanfaat bagi penulis karena, sebagai praktisi pendidikan kepemimpinan merupakan bagian integral dalam diri guru/pendidik. Pendidik adalah juga *leader*, organisator, administrator didalam kelas atau sekolah yang berhubungan dengan siswa dan koleganya. Kendati, dalam kenyataannya dalam dunia pendidikan penerapan ilmu pendidikan tidaklah semudah yang diperkirakan karena pendidikan adalah suatu system yang

terkait berbagai hal diantaranya kebijakan pemerintah, sumber daya pendidik, sarana dan prasarana dan seterusnya. System tersebut, akan menjadi kokoh dan berjalan dengan baik bilamana saling bersinerji mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemimpin pendidikan harus *resonance* yang dapat memimpin dan mempengaruhi lembaga pendidikan untuk mengeluarkan dan mengarahkan segenap potensi-potensi pendidikan secara optimal.

Disisi lain sebenarnya dalam agama Islam dijelaskan “setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban di hari kemudian (hari kiamat)”. Jadi, guru/pendidik dalam kontelasi sistem pendidikan nasional hakikatnya pemimpin yang dapat membimbing dan mengarahkan anak didiknya tidak sekedar pandai secara kognitif belaka, namun lebih penting dari itu hendaknya diperhatikan pula pendidikan moral (pendidikan nilai) agar anak didik menjadi anak yang pandai secara intelegensi, juga secara emosional ia memiliki kehalusan budi yang pada gilirannya berguna bagi dirinya dan orang lain dalam kerangka hidup berdampingan secara damai sebagai warga dunia. Dalam ilmu pedagogic disebut juga sebagai “*dewasa pedagogis*”, bertanggung jawab terhadap dirinya dan kepada orang lain.

Pendidik yang baik selayaknya memahami hal ini. Pendidik yang baik hendak “*well organized*” dalam berbagai tindakan pedagogisnya. Jika implementasi itu dapat terlaksana dengan baik, maka pendidikan nilai di sekolah akan menjadi lebih baik dan niscaya outputnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja unggul inteligensinya namun memiliki EQ,SQ yang baik pula guna menyongsong masa depan Indonesia gemilang (seperti halnya bangsa Jepang yang dapat dipetik berbagai keteladanannya).

Kajian buku secara reposisi ini sangatlah bermanfaat untuk memperluas cakrawala terhadap pendidikan nasional dan diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari negara tertentu untuk menunjang usaha peningkatan kualitas

pendidikan nasional. Berdasarkan hal itu, dalam tulisan ini pun dipaparkan hal-hal yang penting perjalanan politik dan pendidikan negara Jepang, untuk kemudian dikaji persamaan dan perbedaannya dengan sistem yang dikembangkan di Indonesia.

Akhirnya penulis menyadari bahwa “tidak ada gading yang retak” penulisan kajian buku ini belumlah sempurna, saran dan kritik dari pembimbing sangat penulis nantikan.

Terimakasih, kepada Prof. Dr. H. Djuju Sudjana, M.Ed., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan transformasi pembelajarannya. Semoga menjadi ibadah yang dibalas pahala yang besar oleh Allah S.W.T.

Bab II Pembahasan

Dilihat dari segi moral anak-anak sekolah di Jepang dibandingkan dengan negara lainnya yang sama-sama negara industri besar, anak-anak Jepang masih lebih baik. Mereka masih menghormati guru-guru, dan orang tua, masih patuh pergi sekolah setiap pagi.

Namun belakangan ini dikabarkan bahwa terjadi beberapa kasus yang mencengangkan masyarakat Jepang dimana, dalam surat kabar diberitakan terjadi kekerasan di sekolah (*bulliying*) dan dalam beberapa kasus terjadi anak bunuh diri (*suicide*), bolos sekolah, ketidaksantunan pada orang tua, tindak kekerasan pada saudaranya sendiri dan bahkan kepada guru terjadi pula.

Merosotnya moral, terjadi baik disekolah dan di rumah karena faktor diantaranya:

1. Menurunnya mutu guru;

2. Tidak adanya organisasi untuk mengatasi penyimpangan tersebut;
3. Peraturan yang berlebihan;
4. Pengaruh kompetisi yang berlebihan (ujian-ujian sekolah yang menjadi momok pada setiap akhir pembelajaran);
5. Merasa tidak diperhatikan di lingkungan sekolah;
6. Tidak ada pendidikan tambahan di rumah (karena orang tua mereka sibuk);
7. Pengaruh buruk media massa (menjadi penyebab utama).

Sebenarnya pendidikan moral telah diperkenalkan pada anak-anak sekolah Jepang sejak 1958 sebagai alat memperkuat nilai-nilai. Namun banyak diantara mereka saat itu kaku (karena pendidikan bersifat tradisional) tidak suka bergaul dan anti sosial seperti tersebut diatas. Ini karena pada kenyataan di sekolah pendidikan moral kehilangan perhatian dalam pelaksanaannya.

Ketika dari Meiji restorasi 1868, di Jepang para pemimpin adalah di bagi menjadi tiga kelompok yang mempengaruhi kebijakan pendidikan diantaranya:

1. Shintoist,
2. Confucian dan
3. Western-Oriented

Pada awalnya, Kelompok yang Western-orientated mendominasi (di) atas yang lain dua kelompok, sebagian besar dalam kaitan dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat sangat terkesan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang Eropa, dan mereka berpendapat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Eropa akan masuk dan diikuti Jepang.

Akibat Jepang mengejar terus pendidikan iptek, hal ini berakibat pendidikan moral menjadi terabaikan.

Kegagalan ini sama halnya ketika pendidikan di Barat tahun 1872 yang mendewakan kognitif dan kemampuan teknik sementara pendidikan moralnya menjadi terabaikan.

Pendidikan cara diatas dikritik habis oleh para pemimpin tradisional confucian yang lama sekali menjadi “mainstream” pendidikan nasional Jepang. Kelompok Shintoist memegang peranan penting saat restorasi Meiji dimana melakukan terobosan dengan menyerap pengetahuan Barat dengan cara menterjemahkan berbagai literatur Barat kedalam bahasa Jepang dan dimasukan dalam kurikulum sebagai pembejalaran di sekolah-sekolah Jepang. Ada yang khas dari kelompok traditionalis Jepang yakni yakni intens terhadap bimbingan sistem nilai melalui pendidikan di sekolah sebagai kendaraannya.

Di negara-Negara eropa, peran gereja dan kelompok religius memegang peranan penting dalam pendidikan moral. Namun di Jepang, Buddhist dan Shinto agama tidaklah cukup aktif dan kuat untuk dengan bebas mempromosikan pendidikan moral di Jepang. Kelompok traditionalis yang melihat ke sistem persekolahan sebagai sarana untuk meningkatkan kesusilaan bangsa. Sesungguhnya, sebelum Meiji sekolah di Jepang, terutama sekolah unggulan, di kenal mengukir sejarah panjang tentang pendidikan moral sebagai pokok pendidikan.

Pada 1879, babak baru pendidikan Peraturan pendidikan diumumkan resmi dengan **pendidikan moral (*Shushin*) dan discipline (*Shitsuke*)**, **diangkat menjadi prioritas dari berbagai bidang pendidikan di Jepang.** Hingga kini sebenarnya *sushin* dan *shitsuke* lekat dalam benak masyarakat Jepang, dan menjadikan Jepang menjadi bangsa yang maju, modern namun tidak meninggalkan jatidirinya.

Tahun 1890, kerajaan merubah pendidikan yang tadinya liberal ke orientasi yang konservatif. Pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas untuk menggunakan sekolah secara politis sistematis untuk pengajaran paham moral. Pendidikan moral semacam ini, bertahan hingga Perang Dunia II.

Pendidikan moral saat itu berjalan dengan baik, prinsip moral diajarkan melalui pembelajaran sejarah orang-orang besar bangsa Barat seperti Albert Schweitzer, Edward Jenner, Thomas Edison, Christopher Columbus, Marie Curie, Benjamin Franklin, George Washington, Galileo dan Einstein yang dituangkan dalam buku teks yang memberikan keteladanan misalnya kejujuran, kemerdekaan, perikemanusiaan dan seterusnya. Pada prinsipnya berbagai teks terjemahan tersebut menjadi menarik karena berupa cerita biografi atau sejarah orang-orang besar bangsa Barat yang dikemas ringan mudah dipelajari namun sarat dengan muatan atau penguatan nilai-nilai.

Berdasarkan hal tersebut di atas nampak pendidikan moral pada saat itu di Jepang dijalankan secara modern dan progresif. Keteladanan bangsa lain (bangsa Barat) dijadikan contoh untuk dipelajari anak didiknya di sekolah-sekolah. Cara peniruan perilaku yang diteladani atau menyerap hal baik dari orang lain, menjadikan anak didiknya matang dalam berpikir dan berperilaku. Bangsa Jepang pada periode awal mengenal "*imitation is the first creativity*" dimana mereka meniru berbagai hal dari bangsa Barat termasuk teknologi namun kemudian ia menjadi pelopor dan unggul karena mampu mengambil alih dan mengembangkan secara inovatif. Kini Jepang menjadi bangsa yang disegani dan dihormati karena memiliki berbagai keunggulan.

Kenaikan dari ultra-nationalism dan siasat memperkuat pasukan di 1930s mendorong penggantian tokoh pahlawan Jepang menjadi "tokoh pahlawan" orang asing, hal ini berlangsung sesaat (tidak terlalu lama).

Jepang, hingga kini senang menciptakan tokoh-tokoh sendiri yang khas Jepang. Sebagai contoh dalam dunia imajinasi anak (dunia perfileman) Jepang menciptakan tokoh Jiban, Satria Baja Hitam, Dora Emon, Samurai dan berbagai penokohan dalam dunia cergam yang mendunia. Ini juga menjadi bukti bahwa Jepang adalah bangsa yang mandiri dan kreatif, ia senantiasa proteksi diri dengan cara bangga terhadap produk sendiri. Demikian pula dengan persoalan moral

budaya melalui dua pilar utama *sushin* dan *shitsuke* (bermoral dan berdisiplin), Jepang mengokohkan dengan filosofi yang berjatidiri Jepang.

Pada periode kebangsaan, bidang pendidikan telah diubah, terutama sejarah. Pada awal Meiji, sejarah dunia telah diperkenalkan lebih luas, tetapi secara berangsur-angsur pula Jepang mengambil alih kembali sejarahnya mengajarkan kembali pada para siswa tentang pemujaan pada keluarga yang kerajaan dan patriotisme.

Satu karakteristik dari partai politik sesudah perang dunia II, mereka sangatlah sulit berkompromisatu sama lain. Partai LDP merupakan partai konservatif dan paling besar, LDP didukung olehkaum bisnis dan kaum tua kelas menengah, seperti petani dan para pedagang. **Dunia bisnis di jepang secara cerdas menyadari bahwa mutu dari angkatan kerja masa depannya tergantung pada pendidikan.** Dilain hal Jepang secara factual Jepang hanya sedikit memiliki sumber alam, hal ini memicu pemimpin dan masyarakat Jepang berpikir keras menjadi bangsa yang maju dengan kemampuan yang ada. Namun demikian para bisnisman pada saat itu, sudah mulai mempertimbangkan bahwa pendidikan moral adalah hal penting dalam dunia pendidikan.

Pada awalnya, Kelompok yang Western-orientated mendominasi (di) atas yang lain dua kelompok, sebagian besar dalam kaitan dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat sangat terkesan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang Eropa, dan mereka berpendapat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Eropa akan masuk dan diikuti Jepang.

This Western bias was embodied in the Fundamental Code of Education of 1872. As a result, the cognitive and technical side of education was emphasized, while the moral and affective side was neglected.

Akibat Jepang mengejar terus pendidikan iptek, hal ini berakibat pendidikan moral menjadi terabaikan. Kegagalan ini sama halnya ketika pendidikan di Barat tahun 1872 yang mendewakan kognitif dan kemampuan teknik sementara pendidikan moralnya menjadi terabaikan.

System pendidikan yang diperkenalkan cara itu, waktu itu dikritik oleh para pemimpin tradisional, pendidikan Confucian yang telah bertahan lama di Jepang mengkritisi keadaan itu.

Demikian juga dengan kelompok yang Shintoist-orientated yang berperan dalam restorasi Meiji, memberikan masukan dalam kurikulum pendidikan Jepang, dimana perihal terjemahan langsung dari buku teks Barat tidaklah terlalu tepat karena mendasarkan pada pengalaman sehari-hari masyarakat Jepang.

Suatu perhatian yang khusus dari kaum traditionalis adalah perhatian terhadap pendidikan moral. Di Eropa, gereja dan kelompok religius memainkan peran yang penting dalam pendidikan di moral. Sementara di Jepang agama Budha dan Shinto tidak cukup aktif dan kuat dalam mempromosikan pendidikan moral. Padahal, diketahui oleh mereka bahwa dunia pendidikan (sekolah) merupakan kendaraan (*education is vehicle of moral*) dalam menguatkan pendidikan moral. Terbukti, sebelum restorasi Meiji pendidikan moral di sekolah unggulan Jepang ajeg menegakan pendidikan moral.

Pada tahun 1879, tata cara pendidikan sebelumnya telah ditinggalkan dan digantikan dengan peraturan/pendidikan telah diumumkan resmi dengan pendidikan moral yakni Shushin (sebagai tulang punggung pendidikan moral dan prioritas untuk semua jenis pendidikan), yang telah mengangkat ke prioritas puncak dari semua pokok bidang pendidikan. Di 1890, pendidikan di Jepang bergerak dari liberal ke orientasi konservatif. Otoritas pemerintah secara politis dan sistematis untuk menerapkan pengajaran paham moral cukup berarti. Pendidikan menjadi tulang punggung dari pendidikan moral di Jepang sampai akhir dari Perang Dunia II Peperangan. Pendidikan di Jepang berangkat dari liberal ke konservatif. Shushin menjadi pokok puncak pendidikan moral di Jepang.

Ketika masa ultra nasionalisme, pendidikan moral di Jepang berlangsung cukup baik. Cara penyampaian pendidikan moral di antara melalui sejarah, kisah-kisah orang-orang besar (dari Barat). Di antaranya kisah keteladanan Florence Nightingale, Albert Schweitzer, Edward Jenner, Thomas Edison, Christopher Columbus, Marie Curie, Benjamin Franklin, George Washington, Galileo and Einstein yang ditulis dalam teks Jepang. Melalui buku tersebut mereka mempelajari pentingnya usaha, pengorbanan, kejujuran, kemerdekaan, perikemanusiaan dan seterusnya. Disisi lain mereka pun dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Barat.

Pendekatan penyampaian prinsip-prinsip moral dengan cara di atas di Jepang tidak berjalan sangat mulus adakala mendapat kritik. Kritik itu di antara pembelajaran cara itu hanya terkesan hapalan riwayat hidup seseorang saja, dan tidak mencerminkan kehidupan yang terjadi pada masyarakat Jepang. Dan itu artinya bukan atau tidak mewakili standar moral Jepang.

Kenaikan dari Ultra Nasionalis dalam memperkuat pasukan pada tahun 1930an, mulai Jepang kepahlawan Jepang menonjol. Pada saat itu pembelajaran sejarah mulai dirubah. Secara berangsur-angsur Jepang telah menempatkan dirinya dalam sejarah dunia. Periode ini disebut periode kebangsaan. Jepang mulai menanamkan semangat patriotisme dan pemujaan terhadap kerajaan. Kebangsaan itu di Jepang saat itu masuk dalam sepertiga bagian kurikulum (Brown:1955). Perubahan kurikulum terlihat pada pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Inipun menjadi bagian dari mempengaruhi semangat kebangsaan atau membangun nasionalisme untuk memperkuat pasukan Jepang.

Sesudah perang, LDP (Liberal Democratic Party) partai Jepang paling besar dan konservatif yang didukung oleh dunia bisnis dan kaum tua kelas menengah, seperti petani dan para pedagang. Mereka mengetahui bahwa mutu

dari angkatan kerja masa depan tergantung pada pendidikan. Merekapun sangat menyadari bangsa Jepang dengan sedikit sumber alam (hal inipun membuat mereka punya semangat untuk menjadi bangsa yang cerdas). Kalangan bisnispun menyadari bahwa pendidikan moral sejak sebelum perangpun disadari sebagai sesuatu yang penting.

Dalam Buku *The Revival of Values Education in Asia and the West* direkomendasikan berbagai perubahan pendidikan. Perubahan diusulkan oleh LDP melalui kementerian pendidikan Jepang. Dilakin pihak *Nikkyoso* (persatuan guru Jepang) memiliki hak veto untuk menerima atau menolak perubahan tersebut.

Pasca perang pendidikan moral *vacuum* dan pihak konservatif mengcounter perubahan itu terutama pengaruh dari ultra-nasionalism yang gemar berperang. Tidak adanya moral tentunya sangat membahayakan bangsa Jepang. Terminologi moralitas seperti "demokrasi", "persamaan" dan "kebebasan" telah diperkenalkan, tetapi tidaklah gampang untuk diserap menggantikan pemahaman sebelumnya dari kaum tua.

Sebelum masa perang pokok pendidikan moral (Shushin) telah dihapuskan bersama-sama dengan sejarah dan geografi. Sebagai pengganti pokok ini, diperkenalkan ilmu kemasyarakatan. Walaupun pokok ini telah dihormati sebagai lambang dari "pendidikan yang baru" namun dikritik karena tidak bisa menyediakan pengetahuan yang sistematis bagi para siswa. Ilmu kemasyarakatan itu, secara berangsur-angsur cenderung menjadi pecah menjadi sejarah yang kemudian dipecah lagi menjadi geografi dan pelajaran kewarganegaraan. Bagi kaum konservatif ketiadaan moral merupakan masalah serius.

Kementerian Pendidikan Jepang (*Monbusho*) mempersiapkan suatu panduan pendidikan moral, yang mendukung para guru untuk memasukan pendidikan moral kedalam ilmu kemasyarakatan. Pada tahu 1958 pokok yang khusus tentang akhlak telah dilembagakan sebagai pokok di sekolah yang formal,

kendati mendapat pertentangan yang kuat dari persatuan guru dan kelompok lain yang progresif.

Persatuan guru pada akhirnya memberikan dukungan terhadap perubahan, tetapi secara umum menentang pemerintah yang konservatif, termasuk cara pendidikan moral yang diberlakukannya. Para guru dalam hal ini, memegang peranan penting

Nasionalisme dan militerisme, sesungguhnya telah mengajarkan penanaman ideology berperang, kebangsaan dan siap dikirim ke medan perang. Hal itu merupakan kesalahan besar guru saat itu, dan mereka mengatakan “tidak akan mengulang kesalahan yang sama” (*"Never repeat the same mistake"*) menjadi suatu semboyan dari para guru. Para guru menghendaki idealistic pendidikan moral dan dinyatakan tahun 1961 dalam forum persatuan guru.

secara garis besar yang berikut prinsip moral itu meliputi:

- (1) Para Guru perlu melindungi kaum muda, dengan menjawab dengan kebutuhan sesuai sosial masyarakatnya, terutama dengan pemeliharaan damai dan membangun suatu masyarakat yang demokratis (*Teachers should protect youth by responding to the needs of our society, especially by keeping peace and building a democratic society*)
- (2) Para Guru perlu berjuang untuk persamaan dari pendidikan (*Teachers should fight for equality of education*).
- (3) Para Guru harus menjamin suatu perdamaian yang abadi (*"Teachers should secure a lasting peace*).
- (4) Para Guru perlu bertindak dari suatu basis dari kebenaran yang ilmiah (*Teachers should act from a basis of scientific truth*).
- (5) Para Guru perlu mempertahankan kebebasan dalam pendidikan (*Teachers should defend educational freedom*)
- (6) Para Guru perlu mencari atau berpihak pada kebijakan politik yang benar/adil. (*Teachers should seek righteous politics*).
- (7) Para Guru perlu mencoba menciptakan suatu kultur yang baru berjuang menentang terhadap adanya korupsi. (*Teachers should try to create a new culture by struggling against cultural corruption concerning youth*).

Damai, persamaan dan demokrasi masih menjadi tujuan yang utama perjuangan perhimpunan guru Jepang. Sebagai contoh, pengintegrasian dari anak-anak cacat

ke dalam sekolah reguler dan pendidikan untuk anak-anak Hiroshima diperjuangkan luar biasa.

Masyarakat Jepang telah dikacaukan oleh perubahan itu, terutama sepanjang awal periode yang sesudah perang. Masyarakat telah hilang kepercayaan terhadap pendidikan moral dan tidak percaya diri dalam mendidik anak-anaknya. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap pendidikan yang dilaksanakan sekolah-sekolah.

R.P. Dore melakukan studi pada masyarakat urban di Tokyo pada tahun 1951 ternyata 80% dari pendidikan moral tidak berhasil dan mereka (guru) memberikan alasan bahwa "anak sangat buruk berkelakuan", "tidak mengetahui sopan-santun" dan "tidak punya rasa hormat pada yang lebih tua". Dari itulah di perlukan kembali pendidikan etika yang bisa saja diilhami oleh kisah-kisah keteladanan dari cerita kuno dari Ninomiya Sontoku, atau Benjamin Franklin, Jenner atau Noguchi.

Suatu studi lapangan, sekitar empat tahun setelah penetapan moral/akhlak sebagai pokok yang terpisah. Telah diwawancarai 53 orang tua sekolah menengah pertama yang diberikan pendidikan moral. Ternyata konsep tradisional keluarga dan hirarki social masih menempati unsur penting dihadapan mereka. Sebagai contoh: 27 orang menyatakan perlunya sikap menghormati orang tua, 2 orang menentang. 20 setuju menyetujui perihal patriotisme dan cinta tanah air, empat orang menentang. 30 orang menyetujui perlunya pernyataan penghormatan pada atasan dan tak seorangpun menentang.

Disiplin (*Shitsuke*) telah dipertimbangkan suatu komponen yang penting tentang pembelajaran akhlak/moral. Meskipun demikian orang tua menyetujui hal itu sampai dengan batas tertentu, hubungan yang ramah antar para guru dan para murid, ada suatu mendasari asumsi yang keakraban guru dan disiplin siswa tidaklah dapat dipertukarkan. Beberapa komentar menandai persepsi yang dengan jelas berbeda tentang peran guru dan orang tua. Orang Tua tidaklah cukup

memberikan disiplin kepada anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka kadang-kadang mengharapkan para guru untuk melaksanakan fungsi ini secara lebih baik. Di dalam keterampilan membuat tatami misalnya anak mereka berhasil bisnis itu bila anak tersebut dikirim kepada orang lain untuk magangan. Setelah mereka belajar pekerjaan itu, pada orang lain mereka kembali ke rumah dan bekerja bersama orang tua mereka dengan baik (Singleton, 1967, p. 46).

Kejadian seperti menurut penulis, berlaku terjadi pada berbagai keluarga di berbagai etnis atau bangsa. Di Indonesia misalnya seorang kiai akan sangat sulit mendidik anaknya dengan alasan biasanya anak tersebut tidak disiplin dalam menyerap pelajaran. Namun dengan cara menitipkan pada pesantren lainnya maka anak itu akan lebih mandiri dan disiplin dalam belajar.

Tradisi dan sejarah Jepang, dan peranannya bagi masa depan masyarakat melalui aktivitas yang kreatif (Japanese tradition and history, and to contribute to future society through creative activities). Dalam kaitan dengan urbanisasi dan industrialisasi yang cepat di Jepang, lingkungan mulai memburuk. Peluang untuk anak-anak untuk mengambil bagian di kelompok dan aktivitas yang kolektif menjadi terbatas. Bersamaan dengan itu, generasi lebih muda yang tertarik akan tradisi Jepang dan kultur telah mengalami kemerosotan juga.

Tak seorangpun dapat menyangkal keperluan dari pendidikan moral di sekolah; tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena memerlukan metode yang tepat. (*No one can deny the necessity of some kind of moral education in schools; but it is not easy to reach an agreement on the content and methods of moral education*). Di Jepang sendiri pada tataran pelaksanaan mengalami perjalanan dalam sepanjang sejarah mereka.

Seperti dinyatakan sebelumnya partai politik yang progresif, partai politik yang konservatif, Kementerian Pendidikan, perhimpunan guru, para usahawan, para pemimpin dan orang tua adalah berlomba untuk suatu mewujudkan kemabali tujuan moral ideal bagi bangsa Jepang. Meskipun pada kenyataannya sering terjadi pertentangan di antara berbagai kelompok tersebut. Pendidikan moral

dengan penuh kesadaran diajarkan secara formal maupun in formal dengan karakteristik yang khas.

Pendidikan Moral di sekolah menurut Sekolah Pendidikan Hukum. Bagi dari sekolah dasar diuraikan sebagai berikut:

- (1) Untuk untuk menanamkan semangat kerjasama dan kemandirian,kebebasan dalam hubungan antar manusia atas dasar pengalaman anak-anak di dalam kehidupan sosial, di dalam maupun di luar sekolah.
- (2) Untuk mengembangkan suatu pemahaman tentang tradisi dan semangat kebangsaan dan lebih jauh lagi menanamkan semangat kerjasama secara Internasional.
- (3) Untuk menanamkan pengetahuan dasar mengenai makanan, pakaian, perubahan penting kehidupan yang sehari-hari.
- (4) Untuk menanamkan kemampuan matematikal yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (5) Untuk menanamkan kemampuan untuk mengamati dan mengatasi kesulitan hidup secara alami.
- (6) Untuk menanamkan kebiasaan yang menyelamatkan kehidupan yang bahagia dan yang berpengaruh juga bagi keharmonisan pengembangan pikiran dan fisik.

Kurikulum di sekolah dasar dan menengah meliputi tiga kategori:

- (1) area pokok; (2) pendidikan moral; (3) aktivitas khusus

Pendidikan moral di Jepang merekomendasikan bagi para guru mempersiapkan suatu program pendidikan yang menyeluruh untuk pendidikan moral disemua tingkatan sekolah. Para diharapkan untuk mengambil bagian sedang dalam proses terhadap proyek ini. Para guru didukung untuk menyelidiki permasalahan moral yang paling serius yang terjadi di sekolah mereka, sekaligus mencari pemecahan masalahnya.

Menurut suatu survei nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan di 1983, mengenai pelaksanaan pendidikan moral 72 per sen dari sekolah dasar dan 79 per sen dari sekolah menengah pertama. Dan sekitar 90 per

sen dari keduanya sedang menawarkan pendidikan moral sebagai suatu pokok yang mandiri.

Mayoritas para guru di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama adalah dengan serius berusaha untuk mempromosikan pendidikan moral. Mereka berharap kembali pendidikan moral seperti halnya sebelum perang. Namun dihadapan mereka masih pula mempersoalkan kesulitan tentang tatacara mengajar moral secara baik.

Semangat untuk mengembangkan pendidikan moral oleh para guru di Jepang menampakan mengembangkan yang baik diantaranya: guru mengidentifikasi pembejaraan moral melalui drama, dari minggu kemminggu pembelajaran menunjukkan variasi yang beragam. Melalui tema politik, menekankan berbagai hal pokok seperti nilai dari hidup, “kebodohan” dari perkelahian, pentingnya persahabatan, pembelajaran melalui sejarah purbakala. Melalui hal itu suatu pesan yang spesifik dapat disampaikan dengan sederhana. Kemudian pelajaran telah dikembangkan melalui tanya jawab yang berikut dari guru dan para siswa. Demikian juga ketika audio visual berkembang di Jepang, pendidikan moral di Kyoto misalnya, juga turut memanfaatkan keefektipan media tersebut. Tema yang populer di dalam pendidikan moral adalah nilai-nilainya tidak hanya nilai tradisional seperti ‘sikap baik pada orangtua’, nasionalisme, dan lain lain. Lebih dari itu dikembangkan sikap-sikap keseharian siswa dan berbagai permasalahan menjadi pembahasan.

Sekolah bukanlah sekedar tempat pendidikan keilmuan saja, melainkan membentuk perilaku anak, yang pada akhirnya anak dapat memaknai hidup (hidup penuh arti). Anak belajar disiplin bila dikelas duduk tenang belajar berkonsentrasi, anak menghargai peraturan yang berlaku, berperan dalam pemeliharaan lingkungan dan sosialnya, beraktivitas kelompok, sehingga secara keseluruhan kehidupan disekolah dimaknai secara baik (*meaningful*) . Meskipun para siswa datang dari lingkungan yang berbeda.

Kendati pengaruh pendidikan Amerika pada suatu masa sangat kuat di Jepang namun sifat “individualisme” cara amerika tidak dapat diterima karena bertolak belakang dengan nilai-nilai tradisional Jepang.

Norma moral yang teguh (puritans) Nampak di sekolah-sekolah Jepang ditegakan diantaranya disiplin berpakaian, potongan rambut, sopan-santun,tegas, kesederhanaan dan seterusnya menjadi bagian penting dari pendidikan di Jepang. Namun demikian samahalnya dengan permasalahan di negara manapun di Jepang persoalan media menjadi persoalan tersendiri karena media (TV,Radio, surat kabar) sering kali memberikan sesuatu yang berbau sex, kejahatan, dan lain-lain yang berpengaruh pada siswa. Selain itu ketika Jepang menjadi negara Industri, maka dengan sendirinya kegiatan social anak-anak menjadi berkurang (play ground mulai tiada),anak banyak di rumah karena computer pribadi senantiasa menemaninya, ayah-ibu mereka sibuk kerja, pengasuhan/bimbingan anak berkurang, kesempatan anak untuk bersama-sama setelah plang sekolah mulai berkurang. Dan hal ini kadang membawa persoalan baru bagi sekolah dan para guru telah harus mengatasi permasalahan ini dengan sendirinya.

Persaingan di sekolah berupa ujian sangat berlebihan dan menyita habis waktu anak, lagi-lagi sosialisasi kehidupan anak menjadi semakin sempit. Orang tua mereka semakin khawatir dengan keadaan itu, banyak nilai moral dan social yang mengalami kemerosotan, sekaligus khawatir jika hal itu menggiring pada sikap egoistik.

Bangsa Jepang tidak menyangkal bahwa berbagai macam pendidikan moral adalah penting diberikan di sekolah. Tetapi istilah " pendidikan moral" sebelum perang pendidikan moral bersifat rancu karena diartikan khusus pendidikan moral saja. Padahal sebenarnya pendidikan moral meliputi suatu cakupan luas dari aktivitas yang berperan untuk pengembangan dari karakter dan kepribadian anak.

Pendidikan di Jepang Kini dan Hari Esok

Selain kajian berdasarkan buku tersebut diatas, penulis pun tertarik untuk mengkaji sistem pendidikan yang dikembangkan di Jepang dibandingkan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. Perbandingan ini untuk melihat persamaan dan perbedaan sistem pendidikan yang dikembangkan di kedua negara tersebut.

Sistem Pendidikan Jepang

Peraturan pendidikan di Jepang berdasarkan data Cuming dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah perang Dunia II. Sebelum perang, kebijakan pendidikan yang berlaku adalah Salinan Naskah Kekaisaran tentang Pendidikan (*Imperial Rescript on Education*). Dinyatakan bahwa para leluhur Kaisar terdahulu telah membangun Kekaisaran dengan berbasis pada nilai yang luas dan kekal, serta menanamkannya secara mendalam dan kokoh. Materi pelajarannya dipadukan dalam bentuk kesetiaan dan kepatuhan yang luar biasa dari generasi ke generasi yang menggambarkan keindahannya. Masa itu disebut sebagai kejayaan dari karakter Kaisar, dan ia juga telah mengendalikannya dengan sumber-sumber berpendidikan bersama nilai-nilai tradisional yang menyertainya. Pendidikan idealnya mampu mengafiliasikan seseorang kepada orang tuanya, suami isteri secara harmoni, sebagai sahabat sejati, menjadi diri sendiri yang sederhana dan moderat, mencurahkan kasih sayang kepada semua pihak (*share values for better world*), serta menuntut ilmu dan memupuk seni. Dari situlah pendidikan tersebut dapat mengembangkan daya intelektual dan kekuatan moralnya yang sempurna, selalu menghormati konstitusi, dan menjalankan hukum. Dalam kondisi darurat sekalipun, diharapkan dapat mempersembahkan keberanian demi negara, melindungi dan menjaga kesejahteraan istana Kaisar seusia langit dan bumi. Maka, tidaklah menjadi orang yang baik dan setia semata, melainkan mampu melanjutkan tradisi leluhur yang amat mulia.

Sesudah perang, mulai 3 November 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia, jaminan kebebasan berfikir, dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan akademik, dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Pada Maret 1947, melalui Peraturan Pendidikan Nasional (*School Education Law*) ditetapkan susunan dasar pendidikan keseluruhan atas dasar 6-3-3-4 (SD,SMP,SMA,PT) beserta tujuan khusus pada tiap jenjangnya (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 187-189).

Pada Maret 1947 juga berlaku Hukum Dasar Pendidikan (*Fundamental Law of Education*) yang pada hakekatnya merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan *Imperial Rescript on Education*. Misalnya, dalam hubungan antara warga dengan negara, dalam *Imperial Rescript on Education* disebutkan bahwa, *Citizens have the duty to develop their intellectual and moral faculties, observethe laws, and offer themselves courageously to the State in order the quard and maintain the prosperity of Imperial throne* (Imam Barnadib, 1986: 53), (setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersempahkan keberaniannya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana Kaisar). Sedangkan dalam *Fundamental Law of Education* disebutkan bahwa, *Citizen have the right to equal opportunity or receving education according to their ability; freedom from discrimination on acaount of race, cree sex, social status, economic position, or family origin; financial assistance, to the able needy, academin freedom, and the responsibility to build a peaceful State and society* (Imam Banrnadib, 1986: 53), (Setiap warga memiliki kesempatan yang sama menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial, bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai). Perbedaan yang lain adalah mengenai tujuan pendidikan. Dalam *Imperial Rescript on Education* disebutkan bahwa tujuan

pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi Kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah ayah yang sama, yakni Kaisar. Adapun tujuan pendidikan menurut *Fundamental Law of Education* adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas.

Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu:

1. Pusat, *perfektual* (antara Provinsi dan Kabupaten),
2. *Municipal* (antara Kabupaten dan Kecamatan), dan sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi,
3. Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*),
4. Partisipasi masyarakat.

Di samping itu, terdapat asosiasi-asosiasi kepala sekolah, perhimpunan guru (seperti dijelaskan dalam buku Cuming), murid, dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah. Dalam sistem tersebut terdapat peran dan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, asosiasi-asosiasi tersebut, dan masyarakat yang saling mengisi sehingga tercipta sinergi yang memungkinkan sistem tersebut menjadi relatif efisien dan efektif. Hal ini merupakan faktor utama pencapaian mutu pendidikan di Jepang yang relatif tinggi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 175).

Sistem pendidikan umum di Jepang berdasarkan sejarah dan perkembangannya telah ditetapkan lebih dari satu abad yang lalu dan keberadaannya berlangsung lebih lama dari pada kebanyakan negara. Sistem pendidikan Jepang pada dasarnya adalah Sekolah Dasar (SD) 6 (enam) tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 (tiga) tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 (tiga) tahun, Universitas 4 (empat) tahun, dan Lembaga Pendidikan Tinggi 2 (dua) tahun. Wajib belajar adalah dari SD sampai SMP. Untuk masuk SMA dan Universitas pada dasarnya harus mengikuti ujian masuk. Selain sekolah tersebut, ada sekolah kejuruan atau sekolah khusus yang menampung lulusan SD atau SMP. Sekolah ini mengajarkan keterampilan khusus

(<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>). Di samping beberapa jenjang pendidikan tersebut, di Jepang juga terdapat program pendidikan prasekolah, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Play Group (PG).

Jika dilihat dari pengelola sekolah, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu

1. Sekolah Negeri adalah sekolah yang dikelola pemerintah,
2. Sekolah Provinsi adalah sekolah yang dikelola pemerintah daerah,
3. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dikelola badan hukum.

Sedangkan apabila dilihat dari tahun ajarannya, sekolah dimulai bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya

(<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>).

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu

1. Kelompok Bermain atau Play Group (*Hoiku-jo*)
2. Taman Kanak-Kanak (*Youchien*)

Play Group (PG) adalah merupakan fasilitas yang disediakan bagi para orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya di siang hari. Pendaftaran murid baru dimulai setiap awal Januari. Permohonan untuk masuk ke PG ini dilakukan di kantor pemerintahan setempat karena terbatasnya jumlah tempat untuk masuk ke kelompok bermain ini. Biaya pengasuhan disesuaikan dengan pendapatan per kapita orang tua pada tahun sebelumnya yang diatur pemerintah wilayah kota setempat (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id11-04.html>). Lembaga ini disebut *Hoiku-jo* (Pusat Perawatan Siang Hari), dan termasuk lembaga kesejahteraan sosial, di samping juga berfungsi sebagai tempat pendidikan prasekolah. Peserta yang masuk *Hoiku-jo* adalah bayi hingga anak usia 5 tahun. Mereka yang berusia 3 tahun ke atas biasanya mendapat pendidikan

seperti TK. Kebanyakan pusat penitipan anak seperti ini dikelola oleh pemerintah daerah.

Abd. Rahman Assegaf (2003: 176-177) memaparkan bahwa TK di Jepang menerima murid berusia 3 sampai 5 tahun untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak berusia 4 tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun dan bagi pendaftar berusia 5 tahun hanya menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. Lebih dari 50% TK di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya sebagian kecil yang merupakan TK Negeri. Meski demikian, semua TK adalah pendidikan prasekolah di bawah naungan Departemen Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola berdasarkan hukum pendidikan (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-02.html>).

TK atau yang disebut *youchien* bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain:

1. Merancang pendidikan yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola hidup yang sehat, aman, dan menyenangkan;
2. Menumbuhkan semangat kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh kegembiraan dan kerjasama;
3. Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan bersosialisasi;
4. Mengarahkan penggunaan bahasa dengan benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesama;
5. Mengarahkan minat untuk berkreasi melalui pembelajaran musik, permainan, menggambar dan lain-lain.

Pendidikan Wajib

Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6 sampai 15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15

tahun. Pendidikan wajib ini bersifat gratis bagi semua anak, khususnya biaya sekolah dan buku. Untuk alat-alat pelajaran, kegiatan di luar sekolah, piknik dan makan siang di sekolah perlu membayar sendiri. Namun bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu ada juga bantuan untuk kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat SD diwajibkan meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP. Dengan demikian, sekolah wajib ditempuh selama 9 tahun; 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-03.html>).

Hampir semua siswa di Jepang belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama SMP, dan kebanyakan mempelajarinya paling tidak selama 6 tahun. Mata pelajaran wajib di SMP adalah bahasa Jepang, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, seni rupa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu sehingga jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 177-178).

Pendidikan Menengah Atas

Ada tiga jenis SMA, yaitu:

1. *full time*,
2. *part time* (terutama malam hari),
3. tertulis.

Sekolah menengah yang *full time* berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. Bagian terbesar siswa mendapat pendidikan menengah atas di SMA *full time*. Jurusan di SMA dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, *home economic*, dan perawatan. Untuk masuk ke salah satu jenis sekolah tersebut, siswa harus

mengikuti ujian masuk dan membawa surat referensi dari SMP tempat ia lulus sebelumnya.

Hampir semua SMP dan SMA serta Universitas swasta menentukan penerimaan siswa melalui ujian masuk, dan setiap sekolah menyelenggarakan ujian masuk sendiri. Siswa yang ingin masuk sekolah yang bersangkutan harus mengikuti ujian. Karena ujian masuk sangat sulit, siswa kerap mengikuti les tambahan (bimbingan belajar) di *juku* atau *yobiko* pada akhir pekan atau pada sore/malam hari biasa, selain pelajaran sekolahnya (Abd Rachman Assegaf, 2003: 178-179).

Pendidikan Tinggi

Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu:

1. Universitas,
2. *Junior college* (akademi),
3. *Technical college* (akademi teknik).

Di universitas terdapat pendidikan sarjana (S-1) dan pascasarjana (S-2 dan S-3). Pendidikan S-1 berlangsung selama 4 tahun, menghasilkan sarjana bergelar *Bachelor's degree*, kecuali di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan pascasarjana dibagi dalam dua kategori, yakni *Master's degree* (S-2) ditempuh selama 2 tahun sesudah tamat S-1 dan *Doctor's degree* (S-3) ditempuh selama 5 tahun.

Junior college memberikan pendidikan selama dua atau tiga tahun bagi para lulusan SMA. Kredit yang diperlukan di *junior college* dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk memperoleh gelar *Bachelor's degree* (S-1). Lulusan sekolah menengah (setingkat SMP) dapat masuk ke *technical college* (akademi teknik). Pendidikan di lembaga ini berlangsung selama 5 tahun (*full time*) untuk mencetak tenaga teknisi. Universitas dan *junior college* memilih mahasiswanya berdasarkan hasil ujian masuk serta hasil prestasi belajar dari SMA. Untuk sekolah negeri dan umum daerah, sejak tahun 1979 diberlakukan

“tes gabungan kecakapan” yang seragam, sebagai tahap pertama dari sistem ujian masuk. Tahap kedua berupa ujian masuk universitas yang bersangkutan sebagai seleksi final.

Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Ada lima jenis pendidikan tinggi yang bisa dipilih mahasiswa asing di negara Jepang ini, yaitu: program sarjana, pascasarjana, diploma (non gelar), akademi, dan sekolah kejuruan. Program sarjana menerima tiga macam mahasiswa, yaitu: mahasiswa reguler, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa pengumpul kredit. Mahasiswa reguler adalah mereka yang belajar selama 4 tahun, kecuali jurusan kedokteran yang harus menempuh 6 tahun. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang diijinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tetapi kredit itu tidak diakui. Adapun mahasiswa pengumpul kredit hampir sama dengan mahasiswa pendengar, tetapi kreditnya diakui.

Sedangkan program pascasarjana terdiri atas program Master, Doktor, Mahasiswa Peneliti, Mahasiswa Pendengar, dan Pengumpul Kredit. Mahasiswa Peneliti adalah mahasiswa yang diijinkan melakukan penelitian dalam bidang tertentu selama 1 semester atau 1 tahun tanpa tujuan mendapatkan gelar. Program ketiga adalah diploma, yang lama pendidikannya 2 tahun. Enam puluh persen dari program ini diperuntukkan bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Akademi atau *special training academy* adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bidang-bidang khusus, seperti keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari dengan lama pendidikan antara 1 sampai 3 tahun. Adapun sekolah kejuruan adalah program khusus untuk lulusan SMP dengan lama pendidikan 5 tahun dan bertujuan membina teknisi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 179-180).

Dengan demikian, sistem pendidikan di Jepang dapat digambarkan dalam bagan berikut:

SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG

Usia				
28	Pendidikan Tinggi	Doctor's Degree (S-3)		
27				
26				
25		Master's Degree (S-2)		Fakultas Kedokteran Gigi/ Kedokteran Hewan
24				
23				
22	Pendidikan Sarjana (S-1)	Junior College (S-1)	Technical college	
21				
20				
19	Pendidikan Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Technical college	
18				
17				
16	Pendidikan Wajib	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
15				
14				
13				
12				Sekolah Dasar (SD)
11				
10				
9				
8				
7				

6		
5	Pra Sekolah	Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group (PG)
4		
3		

Sistem Pendidikan Indonesia

Malaysia dan India merupakan contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di kedua negara tersebut. beberapa praktek pendidikan yang dilaksanakan Inggris ternyata diteruskan, bisa jadi karena dianggap masih relevan, baik oleh India maupun Malaysia. Pengalaman yang sama bisa dipakai untuk menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Bedanya, meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung selama tiga setengah abad, justru sistem pendidikan yang banyak digunakan adalah masa kependudukan Jepang. Sebut saja sistem penjenjangan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Ketika akhir pendudukan Jepang, pola sistem penjenjangan yang berlaku adalah 6-3-3-4, begitu Indonesia merdeka ternyata sistem penjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4 tahun sampai 6 tahun bagi perguruan tinggi. Tentu saja dengan menyebut kolonial tersebut bukan menunjukkan totalitas karena terlalu banyaknya perbedaan yang dikembangkan oleh negara bersangkutan setelah merdeka. Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 267-268). Hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan undang-undang tentang pendidikan, yaitu UU No.4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia dan UU No.2 Tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, maka pendidikan nasional telah mempunyai dasar legalitasnya. Namun demikian pendidikan nasional sebagai suatu sistem bukanlah merupakan suatu hal yang baku. Suatu sistem merupakan suatu proses yang terus-menerus mencari dan menyempurnakan bentuknya (H.A.R. Tilaar, 1999: 1). Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia selama ini belum mampu menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan dalam menciptakan lapangan kerja, bahkan lulusan yang dihasilkan juga masih disanksikan kualitasnya.

Gerakan reformasi tahun 1998, menuntut diadakannya reformasi bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 November 1998 di Bandung, juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu dipenuhi oleh DPR-RI bersama dengan pemerintah, dengan disahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tanggal 11 Juni 2003 (Anwar Arifin, 2003: 1).

Dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 disebutkan bahwa,

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Prasekolah

Disebut prasekolah karena anak pada usia antara 3 tahun sampai 5 tahun yang dimaksudkan menjadi peserta pendidikan diarahkan untuk persiapan dan adaptasi bagi pendidikan berikutnya di SD. Metode dan materi pelajarannya berpola *learning by doing*, dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut dengan Taman Kanak-kanak (TK). Umumnya TK ini terdiri dua tingkat, yaitu: TK Kecil usia 4 tahun dan TK Besar usia 5 tahun. Namun tidak semua orang tua mengikuti ketentuan tersebut secara ketat. Di antara mereka ada yang memasukkan anaknya langsung ke TK Besar

selama setahun, lalu ke SD menjelang anak berusia 6 tahun. Bahkan dalam kasus tertentu seorang anak diterima masuk SD tanpa melewati pendidikan prasekolah ini.

Umumnya kegiatan belajar di TK sederhana, materi pelajarannya berkisar pada pengenalan warna, benda, huruf dan angka, selebihnya diberikan permainan dan keterampilan untuk kreativitas anak, seperti menggunting, melipat, atau mewarnai (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 268-269). Namun demikian, kurang lebih mulai tahun 1990-an di Indonesia juga mengembangkan Kelompok Bermain atau Play Group.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun yang terdiri atas program pendidikan 6 tahun yang diselenggarakan di SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum pendidikan dasar menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu, yang masing-masing disebut semester gasal dan semester genap. Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Padanan dari SD adalah MI, sedangkan SMP adalah MTS. Bedanya, SD dan SMP berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sedangkan MI dan MTS di bawah Departemen Agama (Depag). Di samping itu, komposisi kurikulum agamanya lebih banyak di MI dan MTS dengan rasio 70% umum:30% agama, sedangkan di SD dan SMP hanya memberikan pelajaran agama dua jam pelajaran dalam satu pekan. Jam belajar di SD lebih panjang dari pada TK. Normalnya siswa masuk kelas pukul 07.00 dan pulang pada pukul 12.00. Meskipun demikian, sebagian SD, terutama yang bernaung di bawah ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, menambah jam belajarnya, baik untuk kegiatan ekstra kurikuler maupun pelajaran yang menjadi ciri khas ormas Islam tersebut

sehingga siswa bisa pulang sekolah pada pukul 13.30. Beberapa SD unggulan kadang kala memperpanjang jam belajarnya hingga sore hari atau biasa dikenal dengan *full days school*. Di sini siswa masuk mulai pukul 07.00 dan pulang pada pukul 16.00, sementara istirahat, sholat, makan siang dimasukkan dalam program pendidikan oleh lembaga tersebut.

Isi kurikulum pendidikan dasar memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggris, dan Muatan Lokal. SD menggunakan sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, sedangkan SMP menggunakan sistem guru bidang studi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 269-270).

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah meliputi SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat dengannya. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Program pelajaran di SMA dan kejuruan lebih luas dari pada pendidikan dasar. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi, dan Kimia), Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi), dan Pendidikan Seni. Sejak kurikulum 1994, program pengajaran di jenjang pendidikan menengah ini diatur dalam program pengajaran khusus yang meliputi tiga jurusan, yakni program Bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program Pengajaran Khusus ini diselenggarakan di kelas II dan dipilih oleh siswa sesuai

dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa guna melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik ataupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk siap terjun ke lapangan kerja.

Kurikulum SMA dan yang sederajat menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu yang masing-masing disebut semester gasal dan semester genap, sedangkan sistem pengejarannya memakai sistem guru bidang studi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 272-273) .

Pendidikan Tinggi

Setelah seorang siswa yang telah menamatkan studi di SMA atau yang setaraf dengannya, apabila ia bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya bisa memilih perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester (SKS). Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dan dapat menempuhnya dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata 1 (S 1) dalam waktu 4 tahun. Namun bila tidak sanggup karena banyak mengulang mata kuliah yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk diwisuda sebagai seorang sarjana bisa lebih dari 4 tahun. Kalau ia berhasil wisuda dan berniat melanjutkan studi lanjut, masih ada dua tahap dalam pendidikan tinggi yang dapat ditempuhnya, yaitu jenjang S 2 atau Magister yang normalnya ditempuh selama 2 tahun dan jenjang S 3 atau Doktor yang efektifnya ditempuh selama 2 tahun, sedangkan sisanya untuk penelitian. Apabila seluruh tahap pendidikan tinggi ini ditempuh, diberi gelar Doktor untuk bidang yang dipilihnya. Jenjang ini mengakhiri karier akademik seseorang secara formal.

Seperti halnya di banyak negara lain, di Indonesia juga dikenal adanya perguruan tinggi negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta. Dalam realitasnya, pelajar Indonesia banyak yang mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlebih dahulu, baru menetapkan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kesan sekolah negeri dan PTN lebih unggul dan absah serta dianggap lebih mudah mendapat kerja masih melekat dan banyak diyakini oleh masyarakat. Padahal, setelah peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk perguruan tinggi diberlakukan dengan status *terakreditasi* dan *nonterakreditasi*, sebenarnya PTN dan PTS diperlakukan sama. Bahkan, bisa jadi PTS mendapat nilai lebih baik daripada PTN. Soal unggul dan jaminan kerja merupakan perkara yang relatif. Perguruan tinggi sekedar menyiapkan pesertanya untuk bermasyarakat, sedang keberhasilan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Perguruan tinggi diharapkan berfungsi sebagai *agent of change* bagi pola kehidupan masyarakat modern. Sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian, pendidikan dilangsungkan dalam bentuk perkuliahan di ruang kelas, penelitian atau riset dilakukan terutama oleh mahasiswa semester akhir sebelum diwisuda (berupa penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi), sedangkan pengabdian dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), atau kalau di universitas keguruan berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 275-276).

Berpijak pada paparan di atas, sistem pendidikan di Indonesia dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut:

**SISTEM PERSEKOLAHAN DI INDONESIA
DALAM UU RI NO. 20 TAHUN 2003**

Usia

24	Pendidikan Tinggi	Doktor (S-3)	Program Doktor (S-3)	Spesialis II (SP II)			
23		Magister (S-2)	Program Magister (S-2)	Spesialis I (SP I)			
22		Sarjana (S-1)	Program Sarjana (S-1)	Diploma 4 (D-4)	Diploma 3 (D-3)	Diploma 2 (D-2)	Diploma 1 (D-1)
21							
20							
19							
18	Pendidikan Menengah	Madrasah Aliyah (MA)	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
17							
16							
15	Pendidikan Dasar	Madrasah	Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
14		Tsanawiyah (MTs)					
13							
12		Madrasah	Sekolah Dasar (SD)				
11		Ibtidaiyah					

10		(MI)	
9			
8			
7			
6			
5		Bustanul Athfal	
4	Pra-Sekolah	(BA) Raudlatul Athfal (RA)	
3			Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG)

Persamaan dan Perbedaan

Dari kajian sistem pendidikan di atas, penulis menemukan adanya beberapa persamaan dan perbedaan sistem pendidikan yang diterapkan pada dua negara tersebut. Adapun persamaannya:

1. Sistem penjenjangan persekolahan pendidikan di kedua negara tersebut sama-sama menggunakan pola 6-3-3-4, yaitu 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4 tahun di perguruan tinggi.
2. Usia siswa yang belajar pada setiap jenjangnya ada yang sama, yaitu pendidikan dasar 9 tahun antara usia 6-15 tahun, sekolah menengah atas usia 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi antara 19-25 tahun.
3. Kedua negara tersebut mewajibkan belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama di SMP, dengan demikian siswa diharapkan mempunyai kemampuan yang berwawasan internasional.

Sedangkan perbedaan yang menyolok pada sistem pendidikan di kedua negara ini sebagai berikut:

1. Dalam tujuan umum pendidikan Jepang mengutamakan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas. Sedangkan di Indonesia pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
2. Jepang tidak memasukkan mata pelajaran pendidikan agama di semua jenjang persekolahan (memisahkan pendidikan agama dengan persekolahan), sedangkan di Indonesia pendidikan agama adalah mata pelajaran yang wajib untuk setiap jenjang persekolahan.
3. Dilihat dari kurikulum yang dikembangkan dapat dikemukakan beberapa hal:
 - a. Kurikulum TK di Jepang tidak membebani anak, karena anak tidak dijejali materi-materi pelajaran secara kognitif tetapi lebih pada pengenalan dan latihan ketrampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum di Indonesia telah berorientasi pada pengembangan intelektual anak.
 - b. Mata pelajaran level pendidikan dasar di Jepang tidak seberagam yang dikembangkan di Indonesia, jumlahnya tidak banyak, sehingga berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu, maka jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda.
 - c. Di Indonesia jarang ditemukan adanya mahasiswa peneliti, lebih-lebih mahasiswa pendengar, sehingga yang ada mahasiswa reguler. Hal itu terjadi barangkali karena orientasi belajar bagi mahasiswa Indonesia jauh berbeda dengan mahasiswa Jepang.
4. Pendidikan wajib di Jepang gratis bagi semua siswa, bahkan bagi anak yang kurang mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk biaya makan siang, sekolah, piknik, kebutuhan belajar,

perawatan kesehatan dan kebutuhan lainnya, sedangkan di Indonesia masih sebatas slogan (kecuali di daerah tertentu, seperti kebijakan di Sukoharjo, tetapi baru terbatas biaya sekolah saja).

5. Sistem administrasi pendidikan di Jepang sudah lama menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan partisipasi masyarakat. Sedangkan di Indonesia baru dalam proses peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi dan juga diberlakukan MBS.

Di samping itu juga ada perbedaan kecil dalam hal mulai masuknya anak pada pendidikan prasekolah, terutama di TK. Kalau di Jepang dimulai usia 3 tahun, sedang di Indonesia dimulai pada usia 4 tahun.

Kesimpulan

Dilihat dari segi moral anak-anak sekolah di Jepang dibandingkan dengan negara lainnya yang sama-sama negara industri besar, anak-anak Jepang masih lebih baik. Mereka masih menghormati guru-guru, dan orang tua, masih patuh pergi sekolah setiap pagi. Namun belakangan ini dikabarkan bahwa terjadi beberapa kasus yang mencengangkan masyarakat Jepang dimana, dalam surat kabar diberitakan terjadi kekerasan di sekolah (*bullying*) dan dalam beberapa kasus terjadi anak bunuh diri (*suicide*), bolos sekolah, ketidaksantunan pada orang tua, tindak kekerasan pada saudaranya sendiri dan bahkan kepada guru terjadi pula.

Merosotnya moral, terjadi baik disekolah dan di rumah karena faktor diantaranya

1. Menurunnya mutu guru;
2. Tidak adanya organisasi untuk mengatasi penyimpangan tersebut;
3. Peraturan yang berlebihan;
4. Pengaruh kompetisi yang berlebihan (ujian-ujian sekolah yang menjadi momok, dll);

5. Merasa tidak diperhatikan di lingkungan sekolah;
6. Tidak ada pendidikan tambahan di rumah (karena orang tua mereka sibuk); --- pola asuh "mother child"
7. Pengaruh buruk media massa (menjadi penyebab utama).

Sebenarnya pendidikan moral telah diperkenalkan pada anak-anak sekolah Jepang, sejak 1958 sebagai alat memperkuat nilai-nilai. Namun banyak diantara mereka saat itu kaku (karena pendidikan bersifat tradisional) tidak suka bergaul dan anti sosial seperti tersebut diatas. Ini karena pada kenyataan di sekolah pendidikan moral kehilangan perhatian dalam pelaksanaannya.

Ketika dari Meiji restorasi 1868, di Jepang para pemimpin adalah di bagi menjadi tiga kelompok yang mempengaruhi kebijakan pendidikan diantaranya:

1. Shintoist,
2. Confucian dan
3. Western-Oriented

Pada awalnya, Kelompok yang Western-orientated mendominasi atas dua kelompok lainnya, sebagian besar dalam kaitan dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat sangat terkesan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang Eropa, dan mereka berpendapat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Eropa akan masuk dan diikuti Jepang.

Akibat Jepang mengejar terus pendidikan ipteks, hal ini berakibat pendidikan moral menjadi terabaikan.

This Western bias was embodied in the Fundamental Code of Education of 1872. As a result, the cognitive and technical side of education was emphasized, while the moral and affective side was neglected.

Kegagalan pendidikan di Barat tahun 1872 yang mendewakan kognitif dan kemampuan teknik sementara pendidikan moralnya menjadi terabaikan.

Pendidikan cara diatas dikritik habis oleh para pemimpin tradisional confucian yang lama sekali menjadi "mainstream" pendidikan nasional Jepang. Kelompok Shintoist memegang peranan penting saat restorasi Meiji dimana melakukan terobosan dengan menyerap pengetahuan Barat dengan cara menterjemahkan berbagai literatur Barat kedalam bahasa Jepang dan dimasukkan dalam kurikulum sebagai pembejalaran di sekolah-sekolah Jepang.

Ada yang khas dari kelompok traditionalis Jepang yakni yakni intens terhadap bimbingan sistem nilai melalui pendidikan di sekolah sebagai kendaraannya. Di negara-Negara eropa, peran gereja dan kelompok religius memegang peranan penting dalam pendidikan moral. Namun di Jepang, Buddhist dan Shinto agama tidaklah cukup aktif dan kuat untuk dengan bebas mempromosikan pendidikan moral di Jepang. Kelompok traditionalis yang melihat ke sistem persekolahan sebagai sarana untuk meningkatkan kesusilaan bangsa. Sesungguhnya, sebelum Meiji sekolah di Jepang, terutama sekolah unggulan, di kenal mengukir sejarah panjang tentang pendidikan moral sebagai pokok pendidikan.

Pada 1879, babak baru pendidikan Peraturan pendidikan diumumkan resmi dengan pendidikan moral (*Shushin*) dan Discipline (*Shitsuke*), diangkat menjadi prioritas dari berbagai bidang pendidikan. Tahun 1890, kerajaan merubah pendidikan yang tadinya liberal ke orientasi yang konservatif. Pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas untuk menggunakan sekolah secara politis sistematis untuk pengajaran paham moral. Pendidikan moral semacam ini, bertahan hingga Perang Dunia II. Pendidikan moral saat itu berjalan dengan baik, prinsip moral diajarkan melalui pembelajaran sejarah oarng-orang besar bangsa Barat seperti Albert Schweitzer, Edward Jenner. Thomas Edison, Christopher Columbus, Marie Curie, Benjamin Franklin, George Washington, Galileo dan Einstein yang dituangkan dalam buku teks yang memberikan keteladan misalnya kejujuran, kemerdekaan, perikemanusiaan dan seterusnya. Pada prinsipnya berbagai teks terjemahan tersebut menjadi menarik karena berupa cerita biografi atau sejarah orang-orang besar bangsa Barat yang dikemas ringan mudah dipelajari namun sarat dengan muatan atau penguatan nilai-nilai.

Pendidikan moral saat itu berjalan dengan baik, prinsip moral diajarkan melalui pembelajaran sejarah oarng-orang besar bangsa Barat seperti Albert Schweitzer, Edward Jenner. Thomas Edison, Christopher Columbus, Marie Curie, Benjamin Franklin, George Washington, Galileo dan Einstein yang dituangkan

dalam buku teks yang memberikan keteladan misalnya kejujuran, kemerdekaan, perikemanusiaan dan seterusnya. Pada prinsipnya berbagai teks terjemahan tersebut menjadi menarik karena berupa cerita biografi atau sejarah orang-orang besar bangsa Barat yang dikemas ringan mudah dipelajari namun sarat dengan muatan atau penguatan nilai-nilai. Pada saat Kenaikan dari ultra-nationalism dan siasat memperkuat pasukan di 1930s mendorong penggantian tokoh pahlawan Jepang menjadi tokoh pahlawan orang asing.

Pada periode kebangsaan, bidang pendidikan telah diubah, terutama sejarah. Pada awal Meiji, sejarah dunia telah diperkenalkan lebih luas, tetapi secara berangsur-angsur pula Jepang mengambil alih kembali sejarahnya mengajarkan kembali pada para siswa tentang pemujaan pada Keluarga yang kerajaan dan patriotisme.

Kini reformasi pendidikan telah dicanangkan Jepang sejak 2001, Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai `Rainbow Plan`.

1. *Mengembangkan kemampuan dasar scholastic siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional*
2. *Mendorong **pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka** melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah*
3. *Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, diantaranya dengan kegiatan ekstra kurikuler olah raga, seni, dan sosial lainnya.*
4. *Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Tujuan ini dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat.*
5. *Melatih guru untuk menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif*

untuk meningkatkan etos kerja guru, dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya.

6. *Pengembangan universitas bertaraf internasional*
7. *Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan (kyouiku kihon hou) (MEXT, 2006).*

Dengan mengkaji persamaan dan perbedaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia masih merupakan warisan kebijakan kolonial, sehingga belum sesuai dengan kebutuhan riil rakyat.
2. Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia sudah berubah, hal ini terjadi karena:
 - a. Tidak bersandar pada filosofi yang kuat.
 - b. Sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor non utama, misalnya: politik, LSM, media massa, pengamat pendidikan, organisasi massa, tokoh perorangan dan perguruan tinggi.
3. Pendidikan di Indonesia belum menemukan karakter bangsa dan belum mampu mempengaruhi ekonomi, politik maupun sosial budaya.
4. Dengan mengacu pada tujuan pendidikannya, pendidikan **di Jepang dapat membangun karakter bangsanya, yaitu kejujuran, kedisiplinan, ketaatan dan tanggung jawab, sedangkan di Indonesia masih sangat universal.**
5. Kurikulum yang dikembangkan belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, terutama di tingkat TK dan SD, dan *over load* SMP dan SMA.
6. Semangat belajar rakyat Indonesia yang masih lemah, sehingga kemauan belajar mereka banyak yang masih karena kebutuhan formalitas. Hal ini menjadikan sepinya mahasiswa peneliti menurut mahasiswa pendengar.

Berpijak pada temuan di atas, guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka menurut hemat penulis perlu dilakukan beberapa hal berikut:

1. Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah seyogyanya bertumpu pada filosofi yang kuat.

2. Dalam rangka pemererat pendidikan, pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi semua peserta didik yang menempuh pendidikan dasar.
3. Meningkatkan anggaran di bidang pendidikan untuk penambahan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu.
4. Menyederhanakan kurikulum, dalam arti tidak *over load* pada masing-masing jenjang pendidikan, dan pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan psikologis anak.
5. Memantapkan sistem administrasi yang digunakan dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan.

Keunggulan Jepang antara lain mempunyai sistem tersendiri selain pendidikan pendidikan moral (*Shushin*) dan discipline (*Shitsuke*), Juga Sikap orang jepang merupakan akar pengikat yang kuat diangkat dari budaya masyarakat dan agama yang disebut dengan nemawasi yaitu: orang jepang harus jadi teladan dan jadi orang pertama (terbukti berbagai teknologi yang dilahirkan Jepang senantiasa mendapat perhatian dunia), Semangat bersaing yang tinggi seperti dalam sejarah industry, bangsa Jepang bisa saja memulai dengan meniru (*imitation is the first creativity*) lalu kemudian Jepang mengembangkan sendiri dan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang ditirunya. Pendidikan moral dijunjung tinggi, berasal dari nilai-nilai agama dan tradisi Jepang. Jepang termasuk negara yang memiliki disiplin tinggi, berbagai negara mengenal hal ini melalui semangat bushido, jibakutai, shamurai dan lain-lain. Seperti yang diungkap dalam buku Cuming mampu bersaing dan menguasai bahkan dapat mengembangkan teknologi Barat namun moralitas Timur atau "menunggang tradisi meraih modernisasi". Bangsa Jepang merupakan bangsa memiliki jati diri yang kokoh, karena komitmen bangsa dan berbagai kebijakan pemerintah selalu ajeg (konsisten) dilaksanakan.

Salah satu tokoh terkenal Fukuzawa Yukichi (1835-1901) yang lahir pada 10 Januari 1835 di Nakatsu (tokoh yang wajahnya menghiasi uang kertas sepuluh ribu yen). Fukuzawa adalah tokoh yang memelopori modernisasi Jepang. Ia juga adalah pendiri dan rektor pertama Universitas Keio, Jepang. Universitas Keio

(*Keio Gijuku Daigaku*) adalah perguruan tinggi tertua dan salah satu yang paling prestisius di Jepang. Universitas ini didirikan pada tahun 1859 sebagai perguruan tinggi swasta yang fokus pada studi Barat dan Fukuzawa mendirikan fakultas pertamanya pada tahun 1890.

Fukuzawa Yukichi yang telah menyebarkan semangat keterbukaan dan menebarkan modernisasi di Jepang lewat perjuangan dan karya-karyanya dalam pendidikan. Tokoh intelektual Jepang yang sangat berpengaruh di Jepang yang membuka mata bangsa Jepang akan adanya dunia lain, selain negeri Jepang ini memang rajin membuat terobosan-terobosan untuk mengubah pandangan Jepang tentang *gaijin* (*orang asing*) dan *kaigai* (*negeri asing*). Pada awal restorasi Meiji Fukuzawa Yukichi mengusulkan ide yang disebut *Datsu A Ron* (*keluar dari Asia*). Target orang Jepang yang paling utama ialah "mengejar sehingga melampaui negara-negara Barat". Dalam usaha itu Jepang mengikuti contoh negara Barat sehingga berekspansi dan menjajah negara-negara tetangga sebelum perang dunia (PD) II. Jepang selalu berguru pada pengalaman dan sejarahnya, baginya pantang melakukan kesalahan yang kedua kali (lihat pendapat Yasumasa dalam Cuming) dan Jepang selalu menyongsong masa depan dengan disiplin dan kreativitas yang tinggi.

Fukuzawa Yukichi, juga orang Jepang yang memiliki gagasan cemerlang. Gagasan yang terkenal tercetus dalam bukunya yang berjudul "Gakumon no Susume" ini pada tahun 1882 telah terjual 600.000 naskah. Pada bagian pendahuluan buku tersebut, Fukuzawa menuliskan

1. "Sebagai jalan yang paling ampuh untuk mencapai tujuan negara adalah melalui pendidikan sebab Tuhan tidak menempatkan manusia yang lain".
2. Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain.
3. Siapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa dan hina.

Memang benar, dalam realitas kehidupan masyarakat ada orang yang berkedudukan lebih tinggi dan ada pula yang berkedudukan lebih rendah.

Perbedaan ini disebabkan karena yang berkedudukan tinggi biasanya lebih mementingkan pendidikan, sedangkan yang rendah sebaliknya.

Sekolah-sekolah di Jepang mengajarkan kedisiplinan dapat kita cermati melalui pendidikan moralnya. Norma dalam masyarakat Jepang sangat terkait dengan ajaran Shinto dan Budha, tetapi menariknya kedua agama ini tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran wajib, seperti halnya pelajaran agama di Indonesia. Namun nilai nilai agama itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Pendidikan moral di dalam bahasa Jepang disebut "doutokukyouiku". Kata *doutoku* berarti moral dan *kyouiku* berarti pendidikan. Kata "doutoku" terdiri dari dua kata, yaitu *dou* yang berarti jalan dan kata *toku* yang berarti *virtue* atau kebaikan. Penggunaan kata "dou" dalam terminologi Jepang banyak sekali, misalnya *judou*, *kendou*, *akidou* (olahraga tradisional Jepang), *shodou* (kaligrafi), *sadou* (tradisi minum teh) yang dalam pemahaman orang Jepang memerlukan ketekunan untuk mencapai taraf tertinggi. Moral atau kebaikan pun memerlukan ketekunan untuk menemukan "jalan" mencapainya (Dedi Suryadi:2007)

Pendidikan moral di sekolah sekolah di Jepang tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran (*integrated learning*). Secara khusus wali kelas bertanggung jawab untuk mendiskusikan aturan kelas, aturan bermain bersama, atau hubungan kerja sama antaranggota kelas dalam 35 jam setiap tahun di SD dan SMP. Dalam pelajaran lain seperti "*seikatsuka*" atau pendidikan tentang kehidupan sehari hari, siswa SD diajari tatacara menyeberang jalan, adab di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi guru juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan mempraktikkannya. Wali kelas juga menyampaikan kasus pelanggaran dan mengajak siswa untuk mendiskusikan pemecahannya. Dalam Cuming hal ini disebut sebagai pembelajaran yang *meaningful*, sehingga anak dapat menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terinternalisasi dalam dirinya dan tanpa paksaan. Yang penting, Jika bangsa Indonesia ingin mencontoh Jepang,

pendidikan moral di Indonesia sudah saatnya beralih dari pendidikan teori kepada pendidikan praktis dan jangan harap kita mampu mengejar ketinggalan dari negara lain kalau masalah pendidikan di Indonesia belum beres dibenahi dan dapat dilaksanakan secara kaffah.

Daftar Pustaka:

- Arifin, Anwar. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

- Assegaf, Abd. Rachman. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media.
- Barnadib, Imam. 1986. *Dasar-Dasar Pendidikan Perbandingan*, Yogyakarta: Institute Press IKIP Yogyakarta.
- Bernson, Mary Hammond and Elaine Magnusson, eds. *Modern Japan: An Idea Book for K-12 Teachers*. Multicultural Education Resource Serial. Olympia, WA: Office of the State Superintendent of Public Instruction, 1984. ED 252 486.
- C.H. Kwan. 2001. 'Yen Bloc: Toward Economic Integration in Asia.' Brookings Institution Press.
- Cogan, John J. and Donald O. Schneider, eds. *Perspectives on Japan: A Guide for Teachers*. Washington, DC: National Council for the Social Studies, 1983. ED 236 090.
- Conrad Totman, 2000. 'A History of Modern Japan. Blackwell Publishers.'
- East Meets West: Mutual Images. Stanford, CA: California Center for Research in International Studies, 1980. ED 196 765.
- Fukuzawa Yukichi , [gakumon no susume]
<http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/gakumon.html>
- <http://id.shvoong.com>, www.edu2000.org/
- <http://murniramli.wordpress.com/2007/03/16/taman> –kanak-kanak-di-jepang/
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-02.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-03.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id11-04.html>
- [http://www.crayonpedia.org/mw/Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendidikan Jepang 9.1"](http://www.crayonpedia.org/mw/Pengaruh_Kebijakan_Pemerintah_Pendidikan_Jepang_9.1)
- <http://www.kgc.keio.ac.jp/yukichi.html>
- <http://www.zombiezodiac.com/rob/fukuzawa.htm>
- Kaderabeck, Leslie. *The Japanese Automobile Worker: A Microcosm of Japan's Success*. 1985. ED 263 041.
- Murphy, Carole. *A Step by Step Guide for Planning a Japanese Cultural Festival*. 1983. ED 238 748.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojtan, Linda S. *Free Resources for Teaching about Japan*. Bloomington, IN: Midwest Program for Teaching about Japan, Indiana University, 1986. ED 270 3891.



Penulis ketika lawatan “Indonesian Cultural Performance” di Kanagawa, Chiba, Nagano, Kawaguchi, Nakano, Tokyo. dan studi banding ke Soka Gakai University, Jepang 2005

